

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, Asikin, & Zainal. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2021). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2022). *Dasar-dasar ilmu politik (Edisi revisi)*. Gramedia.
- Bungin, B. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahl, R. A. (2020). *On democracy* (Updated ed.). Yale University Press.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fadhallah. (n.d.). *Metode penelitian*. UNJ Press.
- Hardiman, F. B. (2021). *Demokrasi deliberatif: Menimbang negara hukum dan ruang publik*. Kanisius.
- Huda, N. (2020). *Ilmu negara*. Rajawali Pers.
- Isra, S. (2021). *Hukum pemilu di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Isra, S. (2021). *Sistem pemerintahan Indonesia: Perspektif ketatanegaraan*. Rajawali Pers.
- Kurniawan. (2016). *Transformasi pelayanan publik*. Jakarta: Prenada Media.
- Martono, N. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Przeworski, A. (2021). *Crises of democracy*. Cambridge University Press.
- Rahman, F. (2021). *Demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia*. Kencana.

- Rahman, F. (2021). *Demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia*. Kencana.
- Rahman, M. T. (2020). *Agama dan politik identitas dalam kerangka sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sedarmayanti. (2009). *Good governance: Membangun manajemen publik yang efektif dan efisien*. Bandung: Mandar Maju.
- Siregar, M., & Halim, A. (2020). *Pendidikan politik dan penguatan etika demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sukandarrumidi. (2006). *Metodologi penelitian: Petunjuk praktis untuk penelitian pemula* (Cet. ke-3). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukardi. (2008). *Metodologi penelitian pendidikan kompetensi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Surbakti, R. (2020). *Memahami ilmu politik* (Cet. ke-6). Jakarta: Grasindo.
- Suyanto. (n.d.). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif empiris dan gabungan*. Unigres Press.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel Jurnal Ilmiah

- Alfarisyi, M. D., Al Hasani, N., & Maulia, S. T. (2023). Meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu melalui pendidikan demokrasi. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(1).
- Amanah, R. T., & Herawati, A. R. (2023). Analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. *Journal of Public Policy and Management Review*.
- Bora, N. A., & Susu, M. T. (2024). Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 3879–3885.
- Farida, J. R., & Kurniati, Y. (2024). Efektivitas pencegahan dan penegakan hukum pidana terhadap politik uang dalam pemilu. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 810–821.
- Fitriyah. (2021). Pendidikan politik sebagai upaya pencegahan politik uang. *Jurnal Politik Lokal*.

- Hakim, L. (2025). Kontribusi pemikiran tokoh Aceh Tamiang dalam membangun demokrasi bebas money politik. *Grondwet Journal*, 2(1), 56–72.
- Khusnia, H. N., Junaidi, A., & Yohanes, Y. T. S. (2024). Pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa. *Jurnal Karinov*, 7(2), 126–130.
- Lestari, D., & Pratama, R. (2021). Efektivitas pendidikan politik terhadap sikap pemilih pemula dalam menolak politik uang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 9(2), 88–89.
- Nurhasim, M. (2022). Efektivitas pendidikan politik berbasis komunitas dalam pencegahan politik uang. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 7(2).
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan politik sebagai proses belajar membentuk kesadaran politik dan peran kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 17(2), 58.
- Purwaningsih, T., Pahlevi, M. E. T., Amrurrobbi, A. A., & Khatami, M. I. (2022). Penguatan demokrasi dari desa di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Politik Profetik*, 11(2).
- Rachmawati, F., & Prakoso, B. A. (2021). Literasi politik dan pragmatisme pemilih. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(1).
- Rahmawati, & Nugroho. (2021). Political literacy and vote selling behavior in local elections. *Journal of Political Education*.
- Rachmawati, F., & Prakoso, B. A. (2021). Literasi politik dan pragmatisme pemilih dalam pemilu serentak 2019. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(1), 64.
- Ridhuan, S. (2021). Transformasi pendidikan politik mencegah politik uang pada pemilu pemilihan langsung legislatif dan eksekutif. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2).
- Santoso, P. (2020). Demokrasi partisipatoris dan tantangan politik lokal. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 5(2).
- Sulaiman, A. (2022). Kelembagaan pendidikan politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1).
- Sulaiman, A. (2022). Pendidikan politik dan pencegahan politik uang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1).
- Sulaiman, A. (2023). Efektivitas pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran demokrasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1).

Susanti, R. (2021). Politik uang dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis. *Lex Renaissance*, 6(3), 578–590.

C. Dokumen Resmi / Laporan / Instansi Pemerintah

Badan Pengawas Pemilu Kota Lhokseumawe. (2021). *Laporan akhir pengawasan pemilu serentak 2024*. Lhokseumawe: Bawaslu Kota Lhokseumawe.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2020). *Panduan pengawasan pemilu*. Jakarta: Bawaslu.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2007). *Penerapan prinsip-prinsip good governance*. Jakarta: Bappenas.

Kesbangpol Kota Lhokseumawe. (2024). *Laporan kegiatan fasilitasi pendidikan politik tahun 2024*. Lhokseumawe: Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Komisi Independen Pemilihan Lhokseumawe. (2024). *Laporan penyelenggaraan pemilu 2024*. Lhokseumawe: KIP Lhokseumawe.

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman umum good public governance*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019*.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2015). *Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Jakarta: LAN.

United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: UNDP.

UNDP Indonesia. (2021). *Tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia*.

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah*.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik* (Edisi Konsolidasi).

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* (Edisi Konsolidasi).

E. Sumber Daring / Website

Radio Republik Indonesia. (2024). Jadi Lhokseumawe, politik uang terpola, caleg hadapi dilema. <https://rri.co.id/pemilu/521954/jadi-lhokseumawe-politik-uang-terpola-caleg-hadapi-dilema>

Wikipedia. (n.d.). *Provinces of Indonesia*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Indonesia